

Banggar Kunjungi DPRD Balikpapan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,18/06/2024

TENGGARONG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Kukar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan, Jumat (14/16). Rombongan dipimpin Abdul Rasid, Ketua DPRD Kukar.

Kedatangan Banggar DPRD Kukar diterima Rachman Basri selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Balikpapan. Abdul Rasid mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan dalam rangka menjalin silaturahmi serta studi komperatif Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2023. “Kita ingin *sharing* dan koordinasi,” ungkapnya.

Menurutnya, Banggar sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemkab dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan. “Banggar ini bertugas mengevaluasi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023,” katanya.

Masukan semua pihak akan dimasukkan dalam penyusun naskah rekomendasi Banggar DPRD, menggunakan dan mempedomani struktur APBD 2023 dengan perubahannya.

Yaitu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), agar tepat waktu.

(adv/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Banggar Kunjungi DPRD Balikpapan, 18/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 68 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020) bahwa badan anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

2. Dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 diatur bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan anggaran berdasarkan representasi anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Dalam Pasal 23 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.